



MIND-MAPPING NILAI PENTING DAN PENGARUH STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN DEGRADASI PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN JAYAPURA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

Dr. Ririt Yuniar, S.Sos., M.Hum.

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, IKAL / PPRA 48 Lemhannas RI,
rurityuniar@gmail.com

Glorius Parulian Yuwono Setra

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, gloriusetra@gmail.com

Abstrak

Salah satu daerah perbatasan yang berada di Jayapura Indonesia perlu diperhatikan pengelolaan degradasi pembangunannya tepatnya di daerah Skouw-Wutung. Meskipun Jayapura terletak jauh dari ibukota Indonesia, bukan berarti dianggap sebagai daerah termarginalkan. Eksistensi sebuah kondisi dinamis suatu bangsa agar dapat meningkatkan ketahanan nasional perlu dioptimalkan implementasinya oleh seluruh *stakeholders* yang bertugas. Hal ini dikarenakan *stakeholders* merupakan wujud yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pembangunan ketahanan nasional di daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis nilai penting dan pengaruh *stakeholders* dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk *mind-mapping*. Tindakan *mind-mapping* akan mempermudah peneliti untuk melihat penggolongan empat jenis *stakeholders*. *Stakeholders* yang berperan dalam permasalahan ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* hingga menghasilkan informan kunci berjumlah 23 orang untuk diwawancarai secara mendalam. Setelah diteliti, nilai penting dan tingkat pengaruhnya memberikan hasil bahwa *stakeholders* yang tergolong *key players* merupakan aktor utama yang melekat dalam mengelola masyarakat dan juga bagian dari masyarakat itu sendiri (para kepala distrik di Jayapura), serta dibantu oleh beberapa instansi pemerintah dalam mendukung peningkatan ketahanan nasional.

Kata Kunci: *stakeholders*, komunikasi pembangunan, degradasi pembangunan, Jayapura, ketahanan nasional



PENDAHULUAN

Indonesia lazim disebut sebagai negara seribu pulau. Data mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-5 sebagai negara dengan jajaran pulau terbanyak di dunia, lebih dari 18 ribu pulau. Indonesia dengan jumlah pulaunya yang melimpah ini tidak dapat dipungkiri harus berbatasan dengan negara-negara asing. Hal ini membuat kompleksitas problem perbatasan bertambah, di mana degradasi pembangunan menjadi yang terdepan. Jumlah penduduk yang begitu banyak pada tahun 2017 mencapai 264 juta jiwa/ tahun, sedangkan di tahun 2019 mencapai 267 juta jiwa/tahun juga menjadi sebuah dinamika tersendiri bagi perkembangan pembangunan bangsa.

Apabila degradasi pembangunan terjadi, konsekuensinya dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu daerah perbatasan Indonesia yang mendapatkan perhatian khusus karena ketahanan nasionalnya yang mulai perlu diwaspadai adalah Jayapura. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi

Jayapura terjadi karena posisinya yang strategis berbatasan dengan negara Papua Nugini. Selain itu, pengaruh dari budaya asing yang ditinggalkan oleh negara-negara yang pernah menjajah Indonesia juga perlu menjadi perhatian khusus.

Jika melihat cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan bangsanya, termasuk Jayapura justru mengalami antonimi (bertolak belakang) dalam realitasnya. Jayapura khususnya wilayah perbatasannya diprediksi akan mengalami kemunduran karena terkontaminasi oleh masuknya kebudayaan asing yang bersifat destruktif. Hal ini dapat dilihat lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Kapasitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa dapat menurun jika tindakan yang dilakukan kurang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya melalui Gerakan Nasional anti narkoba dan anti seks bebas. Gerakan anti narkoba dan anti seks bebas terus menerus diberantas karena hal ini menjadi kerisauan dan keprihatinan seluruh elemen masyarakat.



Sebagai wujud konkrit, lemahnya kondisi pribadi seseorang akan berdampak pada pertumbuhan masyarakat, bangsanya, dan negara itu sendiri. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi dinamis suatu bangsa, terhadap upaya mempertahankan kondisi suatu bangsa yang sehat. Jika pertahanan suatu wilayah lemah, maka akan mudah disuntikkan “ideologi asing” (yang cenderung negatif). Ini sejalan dengan pengandaian Teori Jarum Suntik yang bisa terjadi pada khalayak pasif. Maksudnya adalah bahwa jika daerah tidak mendapatkan perhatian dengan hal-hal yang positif konstruktif, maka kekosongan terjadi sehingga mudah diinjeksi “ideologi asing”.

Penanaman nilai-nilai Pancasila yang merupakan fondasi bagi pembangunan karakter masyarakat menjadi poin penting yang terus menerus perlu disosialisasikan dan diimplementasikan secara masif. Salah satu contoh dengan program Indonesia darurat narkoba, di mana Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menyatakan bahwa sekitar 5 juta dari penyalahgunaan narkoba membuat 40–50 orang per harinya meninggal (lebih dari 16.000 orang/ tahun). Adanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki koneksi dengan strategi *proxy war* (BNN, 2016). Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan, karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Sejalan dengan itu, berdasarkan dari hasil pencatatan statistika *Kabupaten Jayapura dalam Angka 2017*, setidaknya ada 46 kasus narkoba yang terjadi di Jayapura pada 2016–2017. Jika tindakan pengedaran narkoba ini terus terjadi maka Indonesia dapat disebut sebagai pasar narkoba yang membuat kerugian negara hingga Rp63 triliun.

Sementara itu, tindakan seks bebas di luar nikah (perzinahan) juga menjadilah serius untuk ditangani di Jayapura. Berdasarkan hasil statistika *Kabupaten Jayapura dalam Angka 2017*, tercatat setidaknya 40 kasus seks di luar nikah di Jayapura pada 2016–2017. Tindakan seks

di luar nikah selain dapat menyebabkan penyakit yang serius, juga tidak sejalan dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Tindakan seks di luar nikah dapat berujung kepada penyakit HIV/AIDS dan penyakit-penyakit menular berbahaya lainnya. Bahkan berdasarkan hasil statistika *Kota Jayapura dalam Angka 2019*, tercatat setidaknya ada 1392 kasus HIV/AIDS yang terjadi di Jayapura pada 2016–2019 (Badan Pusat Statistika Jayapura, 2019).

Daerah perbatasan yang strategis karena berada pada garda depan bangsa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Daerah ini harus diakui terletak *sangat luar* dan jauh dari pusat pemerintahan yang notabenenya berada di pulau Jawa. Realitas ini mengakibatkan daerah perbatasan menjadi area yang sering disebut marginal, walaupun juga hal itu belum selalu dapat dibenarkan. Elizabeth Noelle-Neumann pada awal tahun 70-an lewat teori Spiral Keheningannya mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang disebut sebagai *marginal* memiliki arti bahwa mereka adalah kaum minoritas. Ironis, bahwa sebenarnya banyak putra daerah yang juga berprestasi dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Namun kenyataannya, belum banyak dioptimalkan pemberdayaan kapasitasnya untuk dapat mewarnai pembangunan di daerahnya.

Efektivitas komunikasi interpersonal menjadi sangat penting agar mereka yang tinggal di perbatasan dapat dirangkul demi tercipta keuletan dan ketangguhannya. Pengelolaan degradasi pembangunan yang terjadi pada daerah marginal ini dapat diupayakan oleh pemangku kebijakan (*stakeholders*). Partisipasi masyarakat di daerah perbatasan masih harus dimobilisasi melalui campur tangan pemerintah dalam mengupayakan kerja sama yang sinergi. Pemangku kebijakan (*stakeholders*) dapat berperan sebagai inisiator dan koordinator pembentukan pembangunan karakter. Pemangku kebijakan (*stakeholders*) dapat berasal dari berbagai lapisan,

yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat itu sendiri.

Pemangku kebijakan (*stakeholders*) adalah *key players* atau pemain-pemain kunci atau aktor yang terlibat dalam pengembangan pendidikan karakter masyarakat khususnya bidang sosial dan budaya. Mereka dapat terlibat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi pemangku kebijakan (*stakeholders*) dapat membawa pengaruh yang baik bagi keberlangsungan daerah perbatasan yang sering dianggap sebagai komunitas terasing (Race & Millar, 2006). Pemangku kebijakan yang terlibat juga akan merasakan dampak dan faedah yang timbul (Gonsalves, dkk; 2005). Kemudian, Solaimani, dkk (2013) mengemukakan bahwa analisis pemangku kebijakan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kompleksitas alias disfungsi peran antar pemangku kebijakan agar manajemen komunikasi pembangunan itu sendiri dapat berjalan lebih optimal.

Maka dari itu, perlu dibuat sebuah pemetaan pemangku kebijakan (*stakeholders mind-mapping*) untuk mengetahui nilai penting dan pengaruh yang ditimbulkan dari tiap pemangku

kebijakan yang berperan atas ketahanan nasional Jayapura ke depannya. Kegiatan memetakan ini nantinya membuahkan *multistakeholders management* yang dapat menyatukan dua *stakeholders* atau lebih dalam satu persoalan yang sama demi mewujudkan ketahanan nasional Jayapura. Serta menjajaki dan bekerja melalui perbedaan-perbedaan untuk bersama-sama mencari pemecahan bagi keuntungan bersama [Gray (1989) dalam Suporahardjo (2005)]. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis nilai penting dan pengaruh *stakeholders* yang memiliki peran dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional.

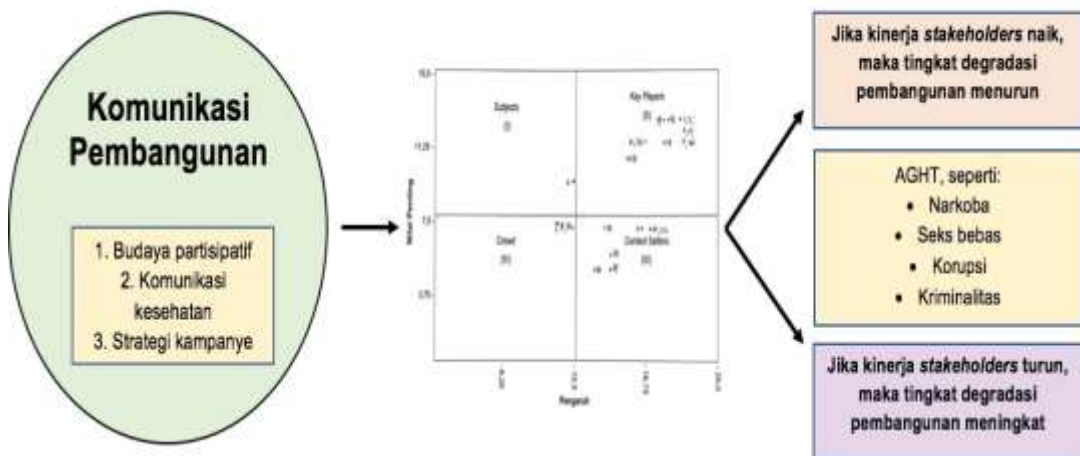
PEMBAHASAN

Pembahasan ini dilandasi dengan alur pikir yang terlampir*

Degradasi Pembangunan dampak dari *Community Development*

Degradasi pembangunan merupakan salah satu konteks penting dalam ilmu komunikasi pembangunan. Sebuah daerah atau wilayah harus membangun dirinya ke arah yang semakin maju supaya tidak terpuruk dalam berbagai hambatan yang

Alur Pikir Peneliti:



ada. Komunikasi pembangunan kerap diterapkan pada daerah-daerah berkembang dan perbatasan seperti di Skouw-Wutung Jayapura. Adanya komunikasi pembangunan sebenarnya sebagai proses pertukaran pesan di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara pemerintah dengan masyarakat (Zulkarimen, 2004: 92).

Komunikasi pembangunan hadir untuk mengelola degradasi pembangunan. Jika ditinjau per katanya, *degradasi* memiliki arti penurunan, kemunduran, dan kemerosotan; sedangkan *pembangunan* memiliki arti proses, cara, perbuatan membangun. Jadi dapat disimpulkan bahwa, penurunan pembangunan yang ditinjau dari perspektif komunikasi apabila degradasi pembangunan terus terjadi, maka daerah tersebut akan terus terpuruk. Kesenjangan dan kesejahteraan kurang merata terus melanda daerah tersebut. Degradasi pembangunan pada suatu wilayah juga dapat berdampak buruk bagi ketahanan wilayah tersebut, termasuk di Skouw-Wutung Jayapura yang terletak pada daerah perbatasan. Berbagai kondisi yang perlu diperhatikan antara lain, pembangunan karakter, penerapan nilai-nilai Pancasila, penguatan norma-norma agama, sosialisasi hidup sehat, menjadi fokus penting penunjang pembangunan dalam konteks efektivitas komunikasi pembangunan.

Kondisi bangsa yang sehat dan maju memerlukan pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai proses memperbaiki situasi sosial di masyarakat yang tinggal di lokasi tertentu dalam upaya pengembangan tindakan sosial, ekonomi, kultural, maupun lingkungan (Alfitri, 2011: 32). *Community development* bertujuan membangun masyarakat yang mana memerlukan media pendukung berupa proses komunikasi. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat komunikasi sosial dalam masyarakat, menyatukan masyarakat, dan membantu masyarakat

untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang efektif, pemahaman, dan tindakan sosial (Jim Iffe dan Frank Tesoriero, 2008: 363).

Jadi, jika melihat dari kondisi pembangunan yang mengalami degradasi, maka hal yang juga sangat penting untuk dibangun terlebih dahulu adalah masyarakatnya. Ada hubungan positif, yaitu jika masyarakat fondasi karakternya lemah, maka sudah dapat dengan mudah terdeteksi bahwa degradasi pembangunannya mengalami ancaman. Fondasi karakter masyarakat melalui pendidikan karakter, sosialisasi anti narkoba, anti seks bebas ke generasi muda dan pendekatan-pendekatan agama sangat cocok untuk dilakukan di daerah perbatasan seperti di Skouw Wutung.

Stakeholders dalam Peningkatan Pembangunan Masyarakat

Terminologi *stakeholders* sudah sangat dikenal banyak orang dan dipakai dalam berbagai macam disiplin ilmu: manajemen, komunikasi, hukum, maupun hankam. *Stakeholders* merupakan orang atau sekelompok orang yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung masa depan suatu organisasi (Eden dan Ackermann dalam Bryson, 2004). Analisis *stakeholders* ini digunakan untuk mengidentifikasi *stakeholders*, mengetahui kepentingan dan pengaruh, serta mengklasifikasi *stakeholders* dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan di Skouw-Wutung Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional. Penentuan *stakeholders* baik yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi suatu kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan guna meningkatkan ketahanan nasional ditetapkan melalui kombinasi hasil observasi lapangan dan wawancara.

Identifikasi *stakeholders* dilakukan dengan dasar tiga komponen subsistem

itu sendiri: pengambil kebijakan, pemberi pelayanan, pelaksana kebijakan dan penerima dampak. Selanjutnya, untuk menentukan siapa yang perlu dipertimbangkan dalam analisis *stakeholders* dilakukan dengan mengidentifikasi komponen yang berkaitan dengan seluruh dinamika pembangunan di Jayapura. *Stakeholders* yang ada diteliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang diklasifikasikan ke dalam lima kelompok: unsur masyarakat (kepala distrik), pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh agama dengan hasil sebanyak 23 orang.

Dua puluh tiga orang *stakeholders* yang diteliti ini merupakan orang-orang yang fokus dalam perspektif ketahanan nasional. Kedua puluh tiga *stakeholders* ini memiliki peran penting untuk mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas SDM di Jayapura. Karakter keuletan dan ketangguhan masyarakat di sana menjadi syarat mutlak dalam peningkatan perekonomian daerah perbatasan. Caranya adalah dengan mengembangkan potensi kearifan lokal menjadi unsur prioritas perekonomian bangsa. Kondisi sosial dan budaya masyarakat juga tidak luput menjadi bahan observasi. Penyusunan matriks pengaruh dan nilai penting dijalankan pada jabaran pernyataan informan yang disajikan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kategorinya. Penetapan *scoring* mengacu pada model pengukuran data berjenjang lima:

Tabel 2.1 Ukuran Kuantitatif Nilai Penting dan Pengaruh *Stakeholders*

Skor	Kriteria	Keterangan
Nilai Penting Stakeholders		
5	Sangat tinggi	Sangat relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
4	Tinggi	Relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
3	Cukup tinggi	Cukup relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
2	Kurang tinggi	Kurang relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
1	Rendah	Tidak relevan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
Pengaruh Stakeholders		
5	Sangat tinggi	Sangat mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
4	Tinggi	Mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
3	Cukup tinggi	Cukup mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
2	Kurang tinggi	Kurang mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura
1	Rendah	Tidak mampu mempengaruhi pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura

Tabel 2.2 Nilai *Importance Stakeholders* dalam Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah Perbatasan Jayapura



Sumber: Data Olahan Pribadi

No	Stakeholders	Subsistem			Jumlah
		Pengambil Kebijakan	Pemberi Pelayanan	Penerima Dampak	
1	Kepala Distrik Jayapura Utara (KDJU)	4	5	5	14
2	Kepala Distrik Jayapura Selatan (KDJS)	4	5	5	14
3	Kepala Distrik Abepura (KDA)	4	5	5	14
4	Kepala Distrik Muara Tami (KDMT)	4	5	5	14
5	Kepala Distrik Heram (KDH)	4	5	5	14
6	Yayasan Pelangi Indonesia (YPI)	3	5	2	10
7	Pendeta di Jayapura	1	1	4	6
8	Pastor di Jayapura	1	1	4	6
9	Ustaz di Jayapura	1	1	4	6
10	Dinas Kesehatan Jayapura (DKJ)	4	2	1	7
11	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Jayapura (BKRKJ)	4	2	1	7
12	Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Jayapura (BPKSLNJ)	4	2	1	7
13	Dinas Pendidikan Jayapura (DPJ)	4	2	1	7
14	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jayapura (DSKCSJ)	3	2	1	6
15	Dinas Olahraga dan Pemuda Jayapura (DOPJ)	2	2	1	5
16	Dinas Kebudayaan Jayapura (DbJ)	2	2	1	5
17	Satuan Polisi Pamong Praja Jayapura (SPPPJ)	4	5	3	12
18	Kodam XVII/Cenderawasih (KXVII)	5	5	3	13
19	Badan Narkotika Nasional Papua (BNNP)	5	4	4	13
20	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5	5	4	14
21	Dewan Ketahanan Nasional (DKN)	5	4	3	12



22	Lembaga Ketahanan Nasional (LKN)	5	4	3	12
23	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	4	3	3	10

Berdasarkan tabel 2.2, terdapat nilai *importance* yang berada pada *stakeholders* unsur Kepala Distrik (Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Muara Tami, dan Heram), Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini diwakili oleh wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, dan Badan Narkotika Nasional Papua. Hal ini menunjukkan *stakeholders* tersebut memiliki relevansi tinggi terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional.

Kelima kepala distrik Jayapura memiliki kepentingan yang sangat dominan terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini dibuktikan dengan kepala distrik menjadi *stakeholder* yang menjalankan tiga subsistem yang ada secara sempurna. Kepala distrik di Jayapura membuat kebijakan dan peraturan tertentu dalam mengelola ketahanan nasional di sana. Kepala distrik di Jayapura juga merupakan *stakeholder* yang paling dekat dengan masyarakat di Jayapura, maka mereka paling cepat mengetahui permasalahan yang terjadi di Jayapura. Kepala distrik juga merupakan bagian dari masyarakat di Jayapura, maka mereka juga menerima dampak baik/tidaknya pembangunan ketahanan nasional di sana.

Stakeholder lain yang juga sangat dominan adalah Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia mengadakan beberapa aktivitas bersama Kodam XVII/Cenderawasih dan Yayasan Pelangi Indonesia untuk menginformasikan hal-hal tentang pembangunan karakter dengan program-program yang meningkatkan ketahanan nasional di Jayapura. Salah satu kegiatan mereka adalah penyuluhan kepada ±25.326 anak-anak di Jayapura perihal antinarkotika

dan anti-seks bebas yang berlangsung



pada awal tahun 2019. Penyuluhan ini menjadi pembangunan karakter bangsa juga didukung dengan peningkatan potensi pangan lokal yang diselenggarakan dalam *event* Pasar Murah secara serentak di daerah perbatasan Jayapura dan Merauke. Tidak hanya itu, pembangunan karakter yang terbentuk dalam rangka peningkatan kapasitas SDM memiliki program-program yang *in-line* dengan para *stakeholders* sehingga tujuan dan cita-cita bangsa dapat terwujud dengan dukungan sesama *stakeholders*.

Adapun *stakeholders* dengan nilai *importance* rendah secara tabulasi terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional adalah para tokoh agama di sana (pendeta, pastor, dan ustaz); Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jayapura; Dinas Olahraga dan Pemuda Jayapura; dan Dinas Kebudayaan Jayapura. Tingkat kepentingan para tokoh agama tergolong rendah karena mereka hanya fokus kepada hal-hal yang berbaur terhadap memberi layanan moral/agama sekaligus menjadi orang-orang yang menerima dampaknya langsung (bagian dari masyarakat). Namun, bukan berarti karena nilai mereka rendah, maka harus diabaikan; justru *stakeholders* apa pun itu harus tetap dijaga relasi satu sama lainnya, karena tiap *stakeholder* memiliki keunikandan fungsinya sendiri. Sesungguhnya tidak hanya itu, persoalan fundamentalnya malah sebenarnya bertumpu pada mereka juga.

Sementara itu, pengaruh *stakeholders* terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura diukur berdasarkan instrumen dan sumber

kekuatan [Galbraith (1983) dalam Reed, dkk (2009)]. Instrumen kekuatan meliputi *condign power* (keuangan, hukuman);

compensatory power (hadiah, gaji/ upah, bantuan kegiatan, penghargaan); dan *conditioning power* (pendidikan, propaganda, opini). Sumber kekuasaan

meliputi *personality power* (kecerdasan, karisma, kekuatan fisik) dan *organization power* (jejaring, fungsi, massa, kesesuaian bidang fungsi).

Tabel 2.3 Pengaruh *Stakeholders* Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah Perbatasan Jayapura

Sumber: Data Olahan Pribadi

No	Stakeholders	Instrumen Kekuatan			Sumber Kekuatan		Jumlah
		Con-dign	Compen-satory	Condi-tioning	Perso-nality	Orga-nization	
1	KDJU	3	3	5	4	5	20
2	KDJS	3	3	5	4	5	20
3	KDA	3	3	5	4	5	20
4	KDMT	3	3	5	4	5	20
5	KDH	3	3	5	4	5	20
6	YPI	2	2	5	3	5	17
7	Pendeta	1	1	5	3	2	12
8	Pastor	1	1	5	3	2	12
9	Ustaz	1	1	5	3	2	12
10	DKJ	3	2	5	5	4	19
11	BKRKJ	4	3	4	4	3	18
12	BPKSLNJ	4	3	4	4	4	19
13	DPJ	3	1	4	3	3	14
14	DSKCPJ	3	2	3	4	3	15
15	DOPJ	3	2	4	3	3	15
16	DbJ	3	1	4	3	2	13
17	SPPPJ	4	4	3	4	5	20
18	KXVII	4	4	3	4	5	20
19	BNNP	4	4	4	3	4	19
20	TNI	4	4	3	4	5	20
21	DKN	4	3	3	4	4	18
22	LKN	4	3	3	4	4	18
23	BPIP	4	3	4	3	3	17

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dilihat bahwa kelima kepala distrik di Jayapura, Tentara Nasional Indonesia (Kodam XVII/ Cenderawasih), dan satuan Polisi Pamong Praja Jayapura memiliki pengaruh paling besar sebagai *stakeholders* untuk mengelola degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional. Kemudian, *stakeholders* berpengaruh lainnya diikuti oleh Dinas Kesehatan Jayapura, Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Jayapura, dan Badan Narkotika Nasional Papua.

pada kelima kepala distrik di Jayapura yang

Unsur kesamaan yang paling tinggi



berkaitan dengan tingkat pengaruhnya adalah instrumen *conditioning*. *Conditioning* berkaitan dengan penciptaan norma dan propaganda yang ada pada masyarakat. Kepala distrik merupakan salah satu subjek yang sering menginformasikan dan menyosialisasikan pembangunan karakter pada masyarakat, baik yang tergolong dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kearifan lokal. Sosialisasi pada bidang kesehatan yang dijalankan berupa sosialisasi HIV/ AIDS yang berulang kali dilakukan dengan bantuan Dinas Kesehatan Jayapura, maupun dinas pendidikan setempat. Kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Papua

juga menjadi poin penting dalam sinergitas *stakeholders* yang paling berpengaruh dalam konteks ini karena mereka memiliki *condign* dan *conditioning* yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan BNN Papua berhasil menangkap delapan belas tersangka pengedar narkoba baik jenis ganja (19kg) maupun sabu (700 gram) selama 2019. (papuanews.com)

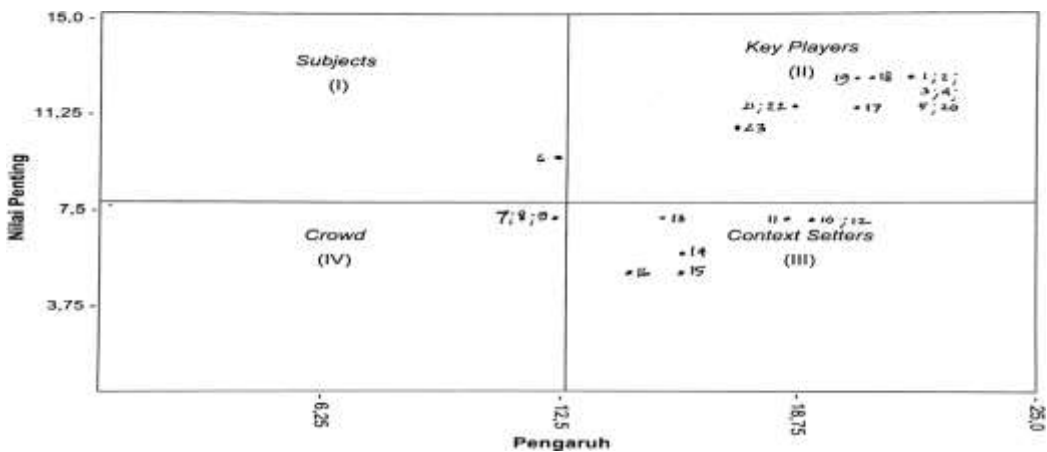
Keterlibatan aktif dan sinergitas antar *stakeholders* sangat dirasa besar manfaatnya tidak hanya membebaskan pada pemangku kebijakan saja. Seluruh elemen masyarakat yang terlibat disini memberi kontribusi kecil untuk perubahan besar sebagai *agent*

of change bagi peningkatan pembangunan daerah perbatasan.

Mind-Mapping Stakeholders Mewujudkan Bangsa yang Berdaulat

Klasifikasi *stakeholders* dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional dilakukan dengan penafsiran matriks nilai penting (*importance*) dan tingkat pengaruh *stakeholders*. Hasil dari perhitungan nilai penting dan tingkat pengaruh selanjutnya dipetakan ke dalam empat kategori *stakeholders* yang disajikan pada *mind-mapping* berikut:

Tabel 2.4 *Mind-Mapping Stakeholders* Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah Perbatasan Jayapura



Keterangan: 1: Kepala Distrik Jayapura Utara; 2: Kepala Distrik Jayapura Selatan; 3: Kepala Distrik Abepura; 4: Kepala Distrik Muara Tami; 5: Kepala Distrik Heram; 6: Yayasan Pelangi Indonesia, 7: Pendetadi Jayapura; 8: Pastor di Jayapura; 9: Ustaz di Jayapura; 10: Dinas Kesehatan Jayapura; 11: Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Jayapura; 12: Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Jayapura; 13: Dinas Pendidikan Jayapura; 14: Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jayapura; 15: Dinas Olahraga

dan Pemuda Jayapura; 16: Dinas



Kebudayaan Jayapura; **17**: Satuan Polisi Pamong Praja Jayapura; **18**: Kodam XVII/ Jayapura; **19**: Badan Narkotika Nasional Papua; **20**: Tentara Nasional Indonesia; **21**: Dewan Ketahanan Nasional; **22**: Lembaga Ketahanan Nasional; dan **23**: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

(1) Subjects

Menurut Groenendijk (2003), pihak yang masuk dalam kategori I (*subjects*) merupakan pihak dengan kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Kategori ini menunjukkan

bahwa Yayasan Pelangi Indonesia memiliki nilai penting yang tinggi sebagai subsistem, ironisnya memiliki pengaruh yang rendah terhadap pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Jayapura dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini disebabkan karena kurang memiliki otoritas yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan jika tidak disupport dengan *stakeholders* lain.

Yayasan Pelangi Indonesia yang dapat dikatakan sebagai sebuah LSM memiliki kepedulian akan karakter bangsa dan ketahanan nasional suatu bangsa, khususnya pada daerah perbatasan. Pentingnya Yayasan Pelangi Indonesia sebagai sebuah LSM menjadi poin penting yang dipertimbangkan oleh para *stakeholders*. Hal ini dikarenakan Yayasan Pelangi Indonesia sebagai lembaga *non-profit* dan sosial murni ingin memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara dalam karakter bangsa, khususnya perihal keuletan dan ketangguhan bangsa yang mewujud dalam ketahanan nasional. Walaupun beberapa aktivitas dan penyuluhan karakter bangsa dilakukan olehnya, namun Yayasan Pelangi Indonesia tidak memiliki pengaruh yang kuat sebab mereka tidak memiliki kuasa untuk menetapkan sanksi atau peraturan-peraturan tertentu bagi pembangunan Jayapura.

(II) *Key Players*

Berdasarkan hasil *mind-mapping*, terdapat dua belas *stakeholders* yang menempati posisi *key players*. *Stakeholders* yang berada pada posisi kategori II (*key players*) ini adalah jenis yang paling kritis karena menurut Groenendijk (2003), pihak yang masuk ke dalam kategori II (*key players*) merupakan pihak dengan

tingkat pengaruh yang tinggi dan juga kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan suatu pengelolaan.

Kedua belas *stakeholders* tersebut berperan sebagai pemangku kebijakan menunjukkan bahwa pembangunan di Jayapura akan maju/meningkat apabila dapat dikendalikan oleh mereka secara terstruktur sesuai dengan sistem manajemen nasional. Hal ini secara mudah didefinisikan dengan fakta bahwa kelima kepala distrik yang ada adalah *opinion leaders* yang paling dekat dengan masyarakat, sekaligus merupakan bagian dari masyarakat. Peningkatan dan penurunan ketahanan nasional suatu bangsa akan dirasakan dan dialami oleh mereka sendiri sesuai dengan dinamika yang terus-menerus terjadi.

(III) *Context Setters*

Berdasarkan hasil *mind-mapping*, terdapat tujuh *stakeholders* yang menempati posisi *context setters*. Menurut Groenendijk (2003), pihak pada kategori III (*context setters*) merupakan pihak dengan pengaruh yang tinggi, namun nilai pentingnya tidak terlalu tinggi. Institusi pemerintah merupakan *stakeholders* yang tergolong ke dalam kategori ini.

Stakeholders pemerintah memiliki kewenangan yang tinggi sehubungan dengan perumusan kebijakan pengelolaan. Dinas-dinas yang berkaitan dengan komunikasi pembangunan dan ketahanan nasional di Jayapura berperan sehubungan dengan kemampuannya dalam memainkan peran intermediasi, penyebaran informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting sebab *stakeholders* yang tergolong ke dalam kategori III (*context setters*) berperan



dalam merumuskan kebijakan serta menjembatani perumusan opini yang berkembang di sekitar Jayapura.

(IV) *Crowd*

Berdasarkan hasil *mind-mapping*, terdapat tiga *stakeholders* yang menempati posisi *crowd*. Menurut Groenendijk (2003), mereka yang berada pada kategori IV (*crowd*) merupakan pihak berpengaruh rendah dan kepentingan yang rendah pula terhadap pengelolaan. Keberadaan *stakeholders* bisa dilibatkan sebagai pendukung (*supporter*).

Ketiga *stakeholders* yang berada pada posisi *crowd* adalah tokoh-tokoh agama di Jayapura: pendeta, pastor, dan ustaz. Wujud dukungan yang dimaksud bisa dilakukan oleh mereka bertiga adalah dengan mengadakan doa lintas agama, sosialisasi *character building* dan kebhinekaan sesuai dengan UUD NKRI 1945 dan Pancasila. Pendekatan agama sangat diperlukan pada konteks ini demi merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Paradigma nasional sebagai sumber utama karakter bangsa harus terus digaungkan agar tidak tergerus oleh ideologi asing. Muatan sosialisasi khotbah mereka lebih mengarah kepada nasionalisme, wawasan Nusantara, Pancasila sebagai ideologi, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Bagaimana pun juga posisi *crowd* ini tetap menjadi unsur fundamental (fondasi) bangsa walaupun tugasnya yang hanya berperan sebagai *supporter*.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebuah perubahan dapat dilakukan jika dimulai dari diri sendiri. Kekurangoptimalan

penanganan daerah perbatasan diakibatkan oleh kondisi *key players* daerah (unsur internal) yang sering dianggap sebelah mata dan penuh masalah dengan tidak ulet serta kurang tangguh dalam menghadapi dinamika pembangunan. Apabila kinerjanya optimal, maka daerah tersebut mampu berubah menjadi daerah yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Komunikasi pembangunan yang berupa **komunikasi partisipatif** seperti halnya menangkalkan konflik pembangunan yang terjadi di dalam dinamika masyarakat dan memerlukan peran serta aktif seluruh elemen bangsa sebagai aktor utama pembangunan yang tentunya perlu dipimpin oleh para pemangku kebijakan. Kondisi dinamis terhadap penanganan ancaman, gangguan dan hambatan sertatantangan di suatu wilayah memerlukan keuletan dan ketangguhan masyarakat baik dari kelas sosial paling bawah sampai yang tertinggi. Hal ini tidak lepas dari efektivitas komunikasi pembangunan yaitu komunikasi partisipatif.

Senada dengan hal di atas, strategi **komunikasi kesehatan** lebih mengarah kepada penyuluhan-penyuluhan akan isu-isu kesehatan yang dapat mengancam kondisi dinamis bangsa: Satuan Polisi Pamong Praja Jayapura, Badan Narkotika Nasional Papua, Tentara Nasional Indonesia (Kodam XVII/ Jayapura), Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Maka dari itu, *stakeholders* yang berperan sebagai *key players* ini perlu melakukan penguatan sinergitas antarinstansi melalui program-program yang dilakukan para pemangku kebijakan. Komunikasi pembangunan yang bersifat strategis, yaitu **strategi kampanye**, dapat berwujud sosialisasi gerakan anti narkoba dan anti seks bebas.

Jika meninjau dari *stakeholders* yang berperan dalam pengelolaan degradasi

pembangunan daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura, unsur yang paling dekat dengan masyarakat Jayapura itu sendiri yaitu, para kepala distrik yang memegang kendali (*key players*) diharapkan mampu menyelesaikan berbagai macam dinamika yang dihadapi wilayah. Kepala distrik sebagai *key players* tidak bekerja sendiri, kepala distrik mengurus segala permasalahan bangsa yang mengancam ketahanan nasional di Jayapura secara internal dan dibantu oleh berbagai *stakeholders* eksternal yang juga sangat mendukung akan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia demi mewujudkan ketahanan nasional sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan (komunikasi partisipatif, komunikasi kesehatan, dan strategi kampanye) di atas.

Saran

1. Pemerintah pusat perlu membuat kebijakan yang strategis berkaitan dengan kemajuan pembangunan wilayah setempat melalui terwujudnya pembangunan perbatasan khususnya Skouw-Wutung di Jayapura yaitu meningkatkan komunikasi pembangunan sesuai dengan sistem manajemen nasional bangsa Indonesia.
2. Strategi yang dilakukan yaitu optimalisasi komunikasi pembangunan dengan *soft power* untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar-*stakeholders* agar tidak terjadi *miscommunication* dan *discommunication*.
3. Upaya mengatasi pertama yaitu, Pemerintah pusat; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian; Dinas Pendidikan; dan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil perlu bersinergi untuk melakukan koordinasi antar-*stakeholders* yang memusat agar terciptanya peningkatan

keuletan dan ketangguhan suatu bangsa melalui program kerja yang dapat diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat Jayapura sesuai dengan kondisi kearifan lokal daerah tersebut. Contoh program kerja yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM dengan cara pelatihan yang intensif dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.

4. Upaya mengatasi kedua yaitu, Pemerintah daerah (kepala distrik Jayapura) bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM perlu melakukan manajemen kolaborasi *stakeholders* agar tidak tercipta *gap* dengan cara mengimbu dan menjalankan aktivitas-aktivitas yang dapat membangun komunikasi Jayapura. Beberapa contoh aktivitasnya adalah doa lintas agama untuk bangsa dan negara, mengadakan pasar murah, sosialisasi gerakan nasional antinarkoba dan antiseks bebas, dan penyuluhan kesehatan. Salah satu caranya dengan menggunakan literasi media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. 2005. *Mekanisme Perencanaan Partisipasi Stakeholders Taman Nasional Gunung Rinjani*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bryson, J. M. 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review* 6(1): 21–53.
- Gonsalves, J., T. Becker, A. Braun, D. Campilan, dan H. Chavez. 2005. *Participatory Research and*



- Development for Sustainable Agriculture and Natural Resources Management: A Sourcebook*. Ottawa: CIP-UPWARD/IDRC.
- Groenendijk L. 2003. *Planning and Management Tools*. Enschede, Belanda: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Noelle-Neumann, Elizabeth. 1993. *The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin*. Edisi ke-2. Chicago: University of Chicago Press.
- Race, D. dan J. Millar. 2006. *Training Manual: Social and Community Dimensions of ACIAR Projects*. Australia: Australian Center for International Agricultural Research.
- Reed M. S., Graves A., Dandy N., Posthumus H., Hubacek K., Morris J., Prell C., Quinn C. H., dan Stringer L. C. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management* XXX: 1–17.
- Solaimani, S., N. Guldmond, dan H. Bouwman. 2013. Dynamic Stakeholder Interaction Analysis: Innovative Smart Living Design Cases. *Electron Markets*, 23, 317–328.
- Suporahardjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Bogor: Pustaka LATIN.
- Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Pengenalannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.